

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemuda merupakan aset strategis dalam pembangunan bangsa karena memiliki posisi sebagai agen perubahan, kekuatan moral, dan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks pembangunan nasional, keberhasilan pembangunan pemuda menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia suatu daerah. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menegaskan bahwa pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menciptakan pemuda yang berkarakter, berkapasitas, memiliki daya saing, serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Oleh sebab itu, pelayanan kepemudaan yang efektif menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pemuda secara menyeluruh.

Pembangunan kepemudaan di Indonesia diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang mencakup berbagai dimensi penting, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP menjadi instrumen penting untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan potensi generasi muda. Secara nasional, pembangunan pemuda masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya angka pengangguran pemuda, rendahnya keterampilan kerja, ketimpangan akses

pendidikan, serta minimnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Publikasi Statistik Pemuda Indonesia Tahun 2024 menyebutkan bahwa pembangunan kepemudaan memerlukan dukungan data dan kebijakan yang tepat karena pemuda memiliki peran strategis dalam menghadapi perkembangan teknologi, persaingan global, dan perubahan sosial masyarakat.

Di tingkat daerah, keberhasilan pembangunan pemuda sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui berbagai program pemberdayaan, pelatihan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kapasitas organisasi pemuda, hingga penyediaan ruang partisipasi sosial. Penelitian mengenai kebijakan kepemudaan di Jawa Timur menunjukkan bahwa beberapa indikator pembangunan pemuda masih mengalami stagnasi, terutama pada aspek kesehatan, kesejahteraan, dan kesempatan kerja pemuda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kepemudaan masih memerlukan evaluasi agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pemuda.

Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah berkembang di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi pemuda yang cukup besar. Di sisi lain, perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren yang positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro mengalami peningkatan dari 70,18 pada tahun 2020 menjadi 71,80 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 72,75 pada tahun

2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun demikian, peningkatan IPM belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan pembangunan pemuda secara spesifik, sebab pemuda memiliki karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang berbeda dibanding kelompok usia lainnya.

Berdasarkan publikasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025, capaian pembangunan pemuda menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa domain yang memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Meskipun sejumlah indikator mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, capaian IPP secara keseluruhan belum sepenuhnya memenuhi target pembangunan kepemudaan yang diharapkan. Domain pendidikan dan kesehatan relatif menunjukkan perkembangan yang baik dengan perolehan nilai 6959, Kesehatan 74,22, Ketenagakerjaan Layak 58,00, Partisipasi dan Kepemimpinan 51,75, Inklusivitas dan Kesenjangan Gender 50,59, namun domain lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta Inklusivitas dan Kesenjangan Gender masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan kepemudaan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pemuda secara komprehensif.

Data IPP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 juga memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas pemuda tidak hanya ditentukan oleh

keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan kompetensi, kesempatan kerja, partisipasi organisasi, kepemimpinan, serta pemberdayaan pemuda secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pelayanan kepemudaan yang mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran, adaptif terhadap perubahan kebutuhan pemuda, serta berorientasi pada peningkatan capaian setiap domain IPP. Dengan demikian, evaluasi terhadap efektivitas pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program-program yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu, Kabupaten Bojonegoro juga menghadapi tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia pemuda, terutama dalam menghadapi persaingan kerja, transformasi digital, dan perubahan sosial ekonomi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan kepemudaan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pemuda masa kini. Pelayanan kepemudaan yang tidak optimal dapat berdampak pada rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, meningkatnya pengangguran usia muda, rendahnya daya saing tenaga kerja muda, hingga munculnya berbagai permasalahan sosial di kalangan generasi muda.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui perangkat daerah terkait telah melaksanakan berbagai program pelayanan kepemudaan, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan pemuda, pemberdayaan organisasi kepemudaan, pembinaan kepemimpinan, hingga kegiatan peningkatan partisipasi sosial pemuda. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan program-program tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan mampu berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan pemuda di Kabupaten Bojonegoro. Evaluasi terhadap efektivitas pelayanan kepemudaan menjadi penting karena keberhasilan program tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup dan kapasitas pemuda.

Untuk menganalisis fenomena ini, penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi Budi Winarno sebagai dasar utama. Teori ini melihat efektivitas organisasi publik dari empat indikator: pencapaian tujuan, ketepatan waktu dan biaya, manfaat bagi kelompok sasaran, serta adaptabilitas terhadap lingkungan (Winarno, 2012). Dalam konteks Dinpora Bojonegoro, pencapaian tujuan berarti kontribusi program kepemudaan pada peningkatan IPP; ketepatan waktu dan biaya merujuk pada kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana; manfaat diukur dari persepsi dan perubahan yang dirasakan pemuda penerima layanan; sedangkan adaptabilitas mengacu pada kemampuan Dinpora menyesuaikan desain

program terhadap kebutuhan pemuda lokal, seperti digitalisasi atau perubahan pasar kerja.

1. Penelitian Muttaqin (2024) menulis di Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo dengan judul “Analisis Regresi Spasial Pendekatan Area Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2022 di Indonesia.” Mereka mengambil pendekatan kuantitatif, menggunakan metode regresi spasial dengan data IPP 2022 dari berbagai wilayah. Fokus utamanya jelas yaitu Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dijadikan tolok ukur utama pembangunan pemuda, lalu mereka menggunakan teori statistik spasial untuk mengamati pengaruh dan keterkaitan antarwilayah terhadap variasi IPP. Hasilnya, ada autokorelasi spasial pada nilai IPP antardaerah. Beberapa variabel yang menjelaskan misalnya indikator pendidikan, ketenagakerjaan, atau sosial-ekonomi ternyata mempunyai pengaruh signifikan terhadap IPP, baik di tingkat nasional maupun regional. Penelitian ini sama-sama memusatkan perhatian pada IPP dan menempatkannya sebagai alat ukur penting keberhasilan pembangunan pemuda. Bedanya, Muttaqin dan rekan-rekan lebih menekankan analisis hubungan statistik antarwilayah dengan pendekatan kuantitatif dan regresif. Sementara Penelitian Ini memilih pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mengkaji seberapa efektif pelayanan kepemudaan Dinpora Kabupaten Bojonegoro, lalu membahasnya secara lebih mendalam dengan pencapaian IPP di satu daerah saja.

2. Penelitian Ningtyas (2019) di Jurnal Respon Publik berjudul “Efektivitas DISPORA dalam Pemberdayaan Generasi Muda (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang)” memilih pendekatan kualitatif deskriptif. Mereka mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu membingkai analisisnya dengan teori efektivitas organisasi dan pelayanan publik. Teori ini biasanya melihat pada pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, pemanfaatan sumber daya, dan tingkat kepuasan penerima layanan. Hasilnya, efektivitas DISPORA Kota Malang dalam pemberdayaan pemuda tergolong cukup efektif program sudah berjalan dan memberi manfaat. Namun, mereka tetap menemukan beberapa kelemahan: program sosialisasi masih kurang, anggaran terbatas, dan belum terjangkau semua kelompok pemuda. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Ini karena sama-sama menilai efektivitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda melalui pendekatan kualitatif. Bedanya, Ningtyas dan tim belum secara langsung menghubungkan efektivitas pelayanan itu dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Sedangkan Ini secara eksplisit eksplisit efektivitas pelayanan kepemudaan Dinpora Bojonegoro dengan variasi domain dan indikator IPP di Kabupaten Bojonegoro.
3. Penelitian Fauzi & Sari (2024) menggunakan pendekatan kualitatif, terutama deskriptif. Penulis mengumpulkan data melalui program wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kerangka pemikirannya menguraikan konsep program kepemudaan, partisipasi pemuda, dan

peran Dispora sebagai fasilitator kegiatan olahraga sekaligus pengembangan prestasi. Hasilnya, program kepemudaan berprestasi yang dijalankan Dispora Tulungagung terbukti cukup efektif dalam mendorong partisipasi serta motivasi pemuda di bidang olahraga. Meski begitu, mereka masih bergelut dengan keterbatasan fasilitas dan minimnya dukungan anggaran. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ini dalam hal sama-sama membahas peran dan program Dispora yang mendorong partisipasi serta kualitas pemuda di tingkat kabupaten. Bedanya, studi di Tulungagung hanya fokus pada satu program spesifik yaitu program kepemudaan prestasi olahraga dan indikator partisipasi olahraga. Penelitian Ini mengambil cakupan yang lebih luas, membahas pelayanan kepemudaan lintas program serta domain, lalu hubungannya dengan lima domain IPP: pendidikan-pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi-kepemimpinan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender.

4. Penelitian Rakhmawan (2021) dalam Jurnal Statistik Indonesia dan Penerapannya (IJSA) berjudul “Mengusulkan Indikator Tambahan untuk Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia dengan Analisis Tingkat Lebih Kecil: Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Selatan” menggunakan pendekatan statistik kuantitatif. Ia menggunakan teknik analisis faktor dan pengukuran indikator. Penelitian ini berangkat dari konsep Youth Development Index (IPP), mengaktifkan indikator yang selama ini digunakan, dan kemudian menawarkan indikator tambahan agar pengukuran pembangunan pemuda di tingkat provinsi/kabupaten

menjadi lebih representatif. Hasilnya, beberapa indikator tambahan seperti indikator partisipasi pemuda, kualitas pekerjaan, atau dimensi sosial tertentu ternyata mampu meningkatkan sensitivitas IPP terhadap variasi lokal. Peneliti lalu mengusulkan desain indeks yang lebih kaya untuk konteks Kalimantan Selatan. Penelitian ini mirip dengan penelitian Ini karena sama-sama menjadikan IPP sebagai kerangka utama dan sama-sama menekankan pentingnya analisis di tingkat daerah. Perbedaannya, Rakhmawan fokus pada pengembangan metodologi dan indikator IPP (aspek pengukuran), sedangkan Ini menyoroti efektivitas pelayanan kepemudaan sebagai faktor yang mempengaruhi pencapaian IPP di Bojonegoro, dengan linisan teori efektivitas organisasi.

5. Terakhir, penelitian Efendi (2020) dalam Jurnal Paradigma berjudul “Studi Korelasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia” menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Ia biasanya menggunakan analisis korelasi atau regresi sederhana untuk menguji hubungan antara nilai IPP dan IPM di berbagai daerah. Dasar teorinya mengacu pada konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan IPP, dengan asumsi bahwa peningkatan kualitas pemuda akan mendorong pembangunan manusia secara umum. Hasilnya jelas ada hubungan positif dan signifikan antara IPP dan IPM. Daerah dengan IPP tinggi umumnya mempunyai IPM yang tinggi juga. Jadi, investasi di s pelayanan kepemudaan Dinpora Bojonegoro sebagai salah satu faktor penentu capaian IPP di satu

kabupaten, dengan pendekatan kualitatif dan teori efektivitas organisasi sebagai fondasi.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian mengenai pembangunan pemuda lebih banyak berfokus pada analisis partisipasi pemuda, pemberdayaan pemuda, serta evaluasi program kepemudaan secara umum. Beberapa penelitian juga menyoroti peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam meningkatkan kapasitas pemuda melalui berbagai program pelatihan dan kegiatan organisasi. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum secara spesifik mengkaji hubungan antara efektivitas pelayanan kepemudaan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai indikator utama pembangunan pemuda. Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau hanya menilai keberhasilan program secara umum tanpa menganalisis secara mendalam proses pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis efektivitas pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pelayanan kepemudaan di tingkat daerah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan pemuda.

Dengan mengaitkan indikator efektivitas organisasi ini pada variasi capaian IPP antar domain, penelitian ini menilai perlunya kajian mendalam tentang efektivitas pelayanan kepemudaan Dinpora Bojonegoro untuk peningkatan IPP. Studi ini tidak hanya penting secara teoretis bagi pengembangan studi administrasi publik dan kebijakan pembangunan pemuda, tetapi juga diharapkan melahirkan rekomendasi nyata bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian mengenai efektivitas pelayanan kepemudaan juga menjadi relevan mengingat besarnya jumlah penduduk usia muda di Indonesia dan meningkatnya tuntutan terhadap kualitas sumber daya manusia yang unggul. Pemuda saat ini dihadapkan pada tantangan globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta perubahan pola kerja yang membutuhkan keterampilan adaptif dan inovatif. Oleh karena itu, pelayanan kepemudaan harus mampu menjawab kebutuhan pemuda secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelayanan kepemudaan memiliki peranan penting dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Namun, masih terdapat kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara program pelayanan kepemudaan dengan kebutuhan nyata pemuda di daerah. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Efektivitas Pelayanan Kepemudaan dalam Rangka Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Bojonegoro” penting dilakukan

untuk mengetahui sejauh mana pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan pemerintah daerah telah berjalan efektif serta mampu mendukung peningkatan kualitas pembangunan pemuda di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan pelayanan kepemudaan yang lebih optimal dan berorientasi pada peningkatan kualitas generasi muda.

B. PERUMUSAN MASALAH

Definisi masalah dalam penelitian merupakan penjelasan mengenai kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga menimbulkan suatu persoalan yang perlu diteliti secara ilmiah. Menurut Sugiyono (2016) , masalah penelitian adalah penyimpangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan, sehingga memerlukan penjelasan dan solusi melalui penelitian.

Rumusan masalah penelitian adalah inti dari pertanyaan besar yang ingin dijawab peneliti. Sugiyono (2016) menyebutnya sebagai “seni menyederhanakan kompleksitas fenomena menjadi pertanyaan terarah” jadi, bukan cuma soal teori, tapi juga bagaimana fakta di lapangan sering bertolak belakang dengan harapan. J. W. Creswell (2018) melihat rumusan masalah sebagai pertanyaan terbuka yang eksploratif, realistis untuk dijawab, dan punya dampak nyata. Ada beberapa syarat utama: rumusan masalah harus SMART (*Specific, Measurable, Action-oriented, Relevant, Time-bound*) menurut (Patton, 2015) harus jelas gap empirisnya mengevaluasi pencapaian

dan manfaat (Winarno, 2012); dan, untuk studi kasus seperti efektivitas Dinpora Bojonegoro, rumusan masalah harus relevan dengan konteks lokal dan kekinian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :“Bagaimana Efektivitas Pelayanan Kepemudaan yang Diselenggarakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro dalam Rangka Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Bojonegoro?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Pelayanan Kepemudaan yang diselenggarakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro dalam Rangka Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Secara teoritis

Kegunaan Teoritis Penelitian ini memperluas pemahaman kita tentang administrasi publik dan studi pembangunan pemuda.

Bukan sekadar menambah teori, namun benar-benar menyajikan bukti nyata tentang bagaimana teori efektivitas organisasi (Winarno, 2012) berjalan dalam urusan layanan kepemudaan, khususnya di

tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini mengukur indikator efektivitas seperti pencapaian tujuan, manfaat bagi sasaran, ketepatan pelaksanaan, dan adaptabilitas organisasi dengan pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Dengan demikian, kita dapat melihat secara jelas bagaimana kinerja pembangunan pemuda di Kabupaten Bojonegoro terbentuk dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

2) Secara Praktis

a) Bagi Dinpora

Penelitian ini menjadi alat evaluasi sekaligus pijakan memperbaiki desain, pelaksanaan, dan pemantauan program kepemudaan. Tujuannya jelas: mempercepat perbaikan pada aspek IPP yang masih lemah, seperti kelayakan ketenagakerjaan, partisipasi dan kepemimpinan, serta inklusivitas gender.

b) Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Temuan dari penelitian ini bisa langsung menjadi masukan dalam menyusun atau mengubah kebijakan, juga dokumen perencanaan seperti RPJMD, RAD kepemudaan, dan penganggaran. Semua didasarkan pada data empiris tentang efektivitas pelayanan kepemudaan, bukan sekedar asumsi.

c) Bagi Intansi Terkait

Untuk Kementerian dan Lembaga seperti Kemenpora dan Kementerian PPN/Bappenas, hasil penelitian ini memberikan gambaran nyata dari tingkat daerah soal penerapan IPP dan

kebijakan lintas sektor kepemudaan. Masukan ini membantu mereka menyempurnakan pedoman, indikator, atau skema pendampingan daerah. Organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda juga diuntungkan. Mereka akan punya bahan advokasi dan dasar referensi untuk memperkuat peran serta pemuda dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong mereka menyusun inisiatif kolaboratif bersama pemerintah daerah.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Terakhir, untuk peneliti dan sejarawan, penelitian ini menawarkan referensi empiris dan metodologis. Temuan di sini bisa jadi linisan penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas layanan publik, pembangunan pemuda, atau penguatan IPP di daerah lain dengan karakteristik serupa.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan dalam pembahasan terhadap materi penulisan skripsi, maka penulis mengelompokkan dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, merumuskan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Semua ini jadi pondasi untuk memahami arah dan konteks penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori-teori utama konsep pemuda, IPP, dan efektivitas organisasi beserta ringkasan penelitian sebelumnya. Semua teori dan temuan itu peneliti rangkai dalam kerangka berpikir yang nantinya menjadi dasar analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mengupas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, populasi, sampel atau informan, fokus penelitian, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, hingga dokumentasi, serta metode analisis data yang peneliti pakai.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan, di mana peneliti tampilkan temuan utama di lapangan terkait pelayanan kepemudaan dan pencapaian IPP, lalu membandingkannya dengan teori dan penelitian terdahulu secara kritis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang langsung menjawab rumusan masalah, lengkap dengan saran-saran yang peneliti tujukan kepada pihak terkait sebagai rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan ke depannya.